

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Dari analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan mengenai tingkat kapasitas yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Padang yaitu:

1. Kapasitas regulasi yang dimiliki Pemerintah Kota Padang dinilai sudah cukup baik, dikarenakan dibandingkan dengan tolak ukur Pemerintah Kota Padang sudah ada perda/perwako terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun untuk peraturan terkait pedoman teknis pembangunan rumah ramah gempa, rehabilitasi dan rekonstruksi serta cara dan metode pelaksanaan bangunan gedung belum ada perda/perwako tapi berpedoman ke permen PU dan SNI. Sehingga diharapkan untuk kedepannya penyusunan regulasi terkait pedoman teknis perlu dilakukan.
2. Kapasitas Komitmen Organisasi yang dimiliki Pemerintah Kota Padang dinilai tinggi. Ini dikarenakan jika dibandingkan dengan tolak ukur, Pemerintah Kota Padang sudah memiliki BPBD sebagai Badan yang Mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, pada program RPJMD dan OPD kegiatan penanggulangan bencana sudah ada, sudah adanya perda RTRW yang berorientasi mitigasi bencana, serta sudah terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Semua tolak ukur sudah dimiliki dan sudah diimplementasikan.
3. Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota Padang dinilai masih rendah dikarenakan bila dibandingkan dengan tolak ukur belum adanya aparatur yang berlatar belakang pendidikan kebencanaan (manajemen kebencanaan, geologi) dan masih terbatasnya personil yang dimiliki. Namun setidaknya untuk personil yang ada saat ini telah diberikan pelatihan-pelatihan terkait penanggulangan bencana sebagai upaya pengembangan sumber daya aparturnya.
4. Kapasitas Pembiayaan Pemerintah Kota Padang dinilai masih rendah,

dikarenakan bila dibandingkan dengan tolak ukur Pemerintah Kota Padang belum mempunyai alokasi dana khusus untuk mitigasi bencana pada pos biaya tak terduga dan persentase untuk kegiatan penanggulangan bencana masih sangat kecil, mengingat Kota Padang sangat rentan terhadap bencana khususnya gempa bumi dan tsunami.

5. Kapasitas Daya Dukung Organisasi Pemerintah Kota Padang dinilai cukup baik karena dibandingkan dengan tolak ukur Pemerintah Kota Padang sudah memiliki sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami namun masih terbatas dari segi kualitas dan kuantitasnya.
6. Secara umum Kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami masuk dalam Kategori Sedang yaitu jika dibandingkan dengan tolak ukur yang ada sudah dimiliki namun harus ditingkatkan lagi. Baik itu kapasitas regulasi, daya dukung organisasi, aparatur dan pembiayaan. Hasil ini divalidasi berdasarkan perangkat penilaian Indeks Ketahanan Daerah maka didapatkan Indeks Kapasitas Daerah Kota Padang sebesar 0,66 yaitu masuk Tingkat Kapasitas Daerah Sedang.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Terkait belum adanya aparatur yang berlatar belakang pendidikan kebencanaan, sebaiknya dapat diusulkan formasi aparatur yang berlatar belakang pendidikan kebencanaan seperti manajemen kebencanaan dan kebencanaan geologi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya aparatur pada bidang kebencanaan di Pemerintah Kota Padang.
2. Perlu dilakukan pelatihan tentang kebencanaan untuk pimpinan instansi sebagai pengambil keputusan mengenai peran masing-masing jika terjadi bencana dan memperkuat koordinasi dan komitmen diantara OPD yang terkait dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana agar tercipta kerjasama yang baik.
3. Perlu melakukan optimalisasi dan pembenahan pada pembiayaan dan

sarana prasarana penunjang mitigasi bencana yang dimiliki dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Pemerintah Kota Padang.